

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
PENDUDUK MISKIN & JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
TERHADAP INVESTASI SEKTOR PARIWISATA HALAL DI PROVINSI
ACEH**

JURNAL ILMIAH

DISUSUN OLEH :

MIFTAH QISMULLAH

165020500111015



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
PENDUDUK MISKIN & JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
TERHADAP INVESTASI SEKTOR PARIWISATA HALAL DI PROVINSI
ACEH**

Yang disusun oleh :

Nama : Miftah Qismullah
NIM : 165020500111015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juli 2020.

Malang, 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Iswan Noor, SE., ME.

NIP. 195907101983031004

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM),
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
PENDUDUK MISKIN & JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
TERHADAP INVESTASI SEKTOR PARIWISATA HALAL DI PROVINSI
ACEH**

Miftah Qismullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : miftahqismullah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa variabel yang mempengaruhi investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Variabel-variabel tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan pada Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan alat analisis IBM SPSS Statistics 24. Perkembangan pariwisata halal secara global menunjukkan tren yang cukup positif tiap tahunnya. Tentu saja Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi merupakan pasar potensial yang sudah seharusnya dioptimalkan. Apalagi jika melihat Provinsi Aceh yang secara hukum memiliki regulasi yang mendukung penerapan sektor ini. Akan tetapi realisasi investasi di Aceh termasuk yang paling rendah di Sumatera. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tren pariwisata halal global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh.

Kata kunci : Pariwisata Halal, Investasi, IPM, PDRB, Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Kunjungan Wisatawan

A. Latar Belakang

Investasi merupakan sebuah instrumen penting dalam proses produksi, baik pada skala makro maupun skala mikro. Investasi merupakan modal untuk pembangunan negara-negara berkembang (Ahmad Saipul Q, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentu saja membutuhkan modal untuk pembangunan ekonominya, baik modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal yang berasal dari luar negeri.

Kemudian hal yang menarik adalah terdapat kecenderungan perubahan pada tren sektor investasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan BKPM pada tahun 2019 juga. Sektor jasa mulai menunjukkan kecenderungan meningkat dimulai dari tahun 2017 dan terus mendominasi pasar investasi di Indonesia hingga saat ini. Bahkan hingga akhir tahun 2019 realisasi investasi sektor jasa baik PMA maupun PMDN mencapai Rp.465,4 Triliun yang mana hal tersebut merupakan capaian terbesar dalam 6 tahun terakhir. Termasuk di dalam sektor jasa adalah sektor jasa hotel, restoran dan wisata lainnya. hal ini lah yang kemudian menjadi landasan pengambilan sektor investasi yang diteliti.

Hotel dan restoran tentu memiliki keterkaitan di dalam ruang lingkup kepariwisataan. Perkembangan sektor pariwisata tentu saja akan menciptakan kondisi usaha hotel dan restoran yang lebih kondusif (Dani P.U, 2011). Sejalan dengan sektor tersebut, terdapat tren yang positif dari lingkup pariwisata halal secara global. Estimasi dari *Global Muslim Travel Index (GMTI)*, jumlah wisatawan yang akan menikmati sektor ini pada tahun 2026 berjumlah 230 juta pengunjung. Adapun di Indonesia, Pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia pada 2018 mencapai 18%. Kemudian ditopang oleh jumlah wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas tercatat 2,8 juta. Dan pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-2 negara dibawah naungan *Organization of Islamic Corporation* dalam hal destinasi pariwisata halal dunia. Ditambah lagi dengan kondisi populasi muslim di Indonesia yang mencapai 87,18% dari total populasi yang berjumlah 232,5 juta jiwa (*Global Islamic Economy Report 2018-2019*), tentu saja ini menjadi ukuran prospek pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah, termasuk pariwisata halal.

Aceh yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah sudah seharusnya menjadi pasar potensial bagi investor pariwisata halal. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi investasi yaitu stabilitas ekonomi dan politik, kejelasan regulasi, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan infrastruktur pendukung (Venti Eka Satya, 2019). Akan tetapi, realisasi PMDN Provinsi Aceh merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi PMA juga termasuk ke dalam peringkat ke-2 yang paling rendah di Sumatera setelah Bangka Belitung (Aceh Dalam Angka, 2019).

Menurut Meirinaldi (2014), salah satu hal yang mempengaruhi investasi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini dikarenakan Indeks ini dapat digunakan sebagai indikator daya saing tenaga kerja. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi pula daya saing Sumber Daya Manusia di negara tersebut. Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar 71,90%, yang mana angka tersebut termasuk ke dalam kualifikasi IPM yang tinggi.

Berdasarkan asas *accelerator* atau disebut juga "*Principle of Divided Demand*" yang menjelaskan bahwa jika pendapatan bertambah, konsumsi juga akan ikut bertambah dan pertambahan konsumsi juga akan mengandung arti bahwa pengeluaran untuk konsumsi juga akan bertambah. Maka dari itulah PDRB dapat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi investasi dalam pemenuhan produksi terhadap permintaan tersebut (Siti Syafaatul Utma, 2019). Pada tahun 2018, total PDRB provinsi Aceh adalah Rp. 155.912 M. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.105 M daripada tahun 2017 (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2019).

Kemudian salah satu komponen yang dapat mempengaruhi investasi pariwisata adalah wisatawan yang mengunjungi objek wisata terkait. Hal ini sesuai pernyataan Faurani I Santi S (2014) yang menyatakan bahwa dalam lingkup pariwisata juga terjadi proses *Supply and Demand*. Tiap tahunnya, kunjungan wisatawan di Aceh terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 total kunjungan wisatawan (nusantara & mancanegara) berjumlah sebesar 2.498.249 orang, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.364.383 orang (Provinsi Aceh Dalam Angka 2019). Akan tetapi terdapat fenomena bahwa Aceh merupakan provinsi ter-miskin di Sumatera. Menurut M. Ichwan, Dkk (2019), kemiskinan memiliki pengaruh terhadap

investasi suatu wilayah. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu daerah merupakan suatu dampak yang timbul akibat dari kegagalan sistem perekonomian yang dijalankan oleh pemerintah. Yang mana pada awal tahun 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 819 ribu orang atau 15,32% (Aceh Dalam Angka, 2020).

Secara teori maupun penelitian terdahulu, seharusnya variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal di Aceh. Akan tetapi rendahnya realisasi investasi tidak menunjukkan hal yang selaras. Oleh karena itu, dengan dasar fenomena, teori dan bukti penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait investasi sektor pariwisata halal di Aceh dan beberapa variabel yang mempengaruhinya.

B. Kajian Pustaka

Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu penyelenggaraan suatu kebijakan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi dan daerah yang bersangkutan (Husni Jalil, dkk, 2010). Pada pasal 1 UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) dijelaskan bahwasanya Peraturan Daerah yang dijalankan di Aceh untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh adalah Qanun. Kemudian diperjelas pada pasal 20 UUPA, bahwa asas pertama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh adalah asas ke-Islaman.

Hal ini menunjukkan semangat ke-Islaman Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka terbitlah Qanun Nomor 8 Tahun 2013 yang menaungi sektor kepariwisataan dan Qanun Nomor 4 Tahun 2013 yang menaungi permasalahan penanaman modal.

Pariwisata Halal

Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian berangkat dari hal tersebut dan mengikuti perkembangan permintaan pasar, muncul istilah baru yaitu konsep pariwisata syariah.

Terminologi Pariwisata Halal di beberapa negara memiliki beberapa sebutan yang berbeda, diantaranya seperti *Islamic Tourism*, *halal travel*, *as moslem friendly destination*, ataupun wisata syari'ah (Kementerian Pariwisata, 2015). Definisi Pariwisata Halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syari'ah (Kemenpar, 2012).

Pariwisata halal juga sudah secara resmi direkomendasikan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 108 Tahun 2016. Dan kemudian diteruskan oleh beberapa Pemerintah Daerah melalui Peraturan-Peraturan Daerah nya. Sektor ini juga masuk ke dalam sub sektor pada *MasterPlan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

Investasi

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Aturan tersebut mendefinisikan penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Boediono (2001) mendefinisikan

investasi sebagai pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan.

Ada 3 jenis investasi (Noor, 2007) :

- a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)
- b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Sejalan dengan pandangan Keynes, menurut Venti Eka Satya (2019) melalui publikasi kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi investasi saat ini. Uraianya adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian fasilitas yang mendorong adanya investasi
- b. Stabilitas ekonomi dan politik
- c. Peraturan perundang-undangan yang mendukung investasi
- d. Infrastruktur yang menunjang dan memadai
- e. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas

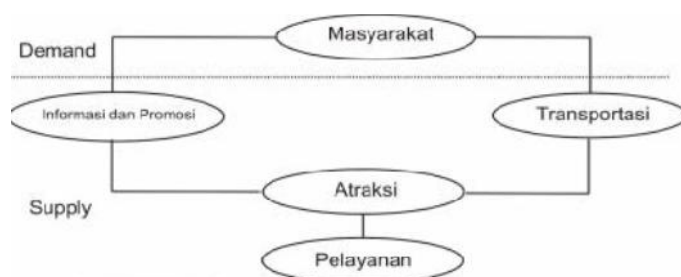
Adapun di dalam penelitian ini pemaknaan investasi dikembalikan kepada investasi sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata merupakan investasi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana prasarana pariwisata dan juga destinasi pariwisata (Nurhayati, 2016).

Teori Permintaan dan Penawaran Jasa Pariwisata

Permintaan dan penawaran dalam konteks pariwisata merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika wisatawan mengunjungi destinasi wisata, mereka mengharapkan pengalaman positif sehingga penawaran dan permintaan menjadi salah satu faktor penentu dalam memberikan kesan positif tersebut (Payangan, 2017). Cukup masuk akal untuk berasumsi bahwa semakin besar jumlah wisatawan yang akan berpergian akan meningkatkan permintaan dari seluruh rantai nilai yang berkaitan dengan pariwisata. Inilah konsekuensi objektif dari wisatawan yang datang ke suatu tempat tertentu (Swarbrooke dan Horner, 2001).

Menurut Gunn (1988) di dalam (M. Adgyl Richardy, 2014), sistem fungsional pariwisata melalui pendekatan *Demand* (Permintaan) dan *Supply* (Penawaran). Dari sisi *Demand* komponen pariwisata adalah masyarakat atau pasar wisata yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan perjalanan wisata. Sementara dari sisi *Supply* kompone pariwisatanya terdiri atas atraksi dan pelayanan wisata, transportasi serta informasi dan promosi wisata yang semuanya ada dalam suatu wilayah pariwisata.

Gambar 1. Diagram Sistem Fungsional Pariwisata



Sumber : Gunn (1988)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa sistem fungsional pariwisata pada hakekatnya merupakan penjabaran komponen-komponen penawaran-permintaan

pariwisata. Karakteristik permintaan wisata ditandai dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut :

- a. Elastisitas
- b. Sensitivitas
- c. Perluasan
- d. Musim

Variabel yang Mempengaruhi Investasi Pariwisata Halal

Investasi sektor pariwisata halal merupakan investasi yang dilakukan di dalam bidang pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana prasarana pariwisata dan juga destinasi pariwisata (Nurhayati, 2016) dengan pertimbangan terhadap aspek ke-halalan dan ke-syariahan sektor pariwisatanya. Melalui faktor-faktor yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi yang telah penulis uraikan sebelumnya. Maka dari itu penulis menentukan variabel-variabel sebagai berikut : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk miskin dan Jumlah kunjungan wisatawan.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Variabel ini merepresentasikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia pada lokasi penelitian. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu : umur panjang dan hidup sehat melalui angka harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan berdasarkan angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak dari PDB per kapita (BPS, 2019).

Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok (IPM, 2018). Uraianya sebagai berikut :

- Sangat tinggi : IPM \geq 80
- Tinggi : 70 \leq IPM $<$ 80
- Sedang : 60 \leq IPM $<$ 70
- Rendah : IPM $<$ 60

b. Produk Domestik Regional Bruto

Domestik atau regional disini dapat diartikan sebagai Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Adapun produk domestik, menurut Badan Pusat Statistik merupakan Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.

Pada tingkat provinsi, PDRB menggambarkan kemampuan provinsi terkait menghasilkan nilai tambah pada suatu periode tertentu. PDRB dihitung dengan dua pendekatan, yaitu menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. Adapun berdasarkan hasil perhitungan terbagi dua, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan PDRB ADHB dikarenakan PDRB ADHB menunjukkan kemampuan Sumber Daya Ekonomi pada tahun berjalan dan ini tentu saja dapat menjadi acuan kondisi perekonomian daerah yang diteliti.

c. Jumlah Penduduk Miskin

Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun alasan peneliti menggunakan variabel ini dikarenakan terdapat sebuah fenomena dimana provinsi yang ingin diteliti merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Dan tentu stigma ini akan berdampak tidak baik terhadap iklim investasi karena mencerminkan sebuah sistem perekonomian yang gagal.

d. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009, definisi dari wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.

Adapun variabel ini tentu saja memiliki keterkaitan dengan permintaan dan penawaran pada sektor ini yang tentu saja akan berdampak terhadap laba kepada investor. Hal tersebut dapat direpresentasikan melalui peningkatan jumlah kunjungan akan mempengaruhi peningkatan permintaan atas konsumsi atas barang dan jasa pada lokasi tujuan yang ingin di datangi.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebuah dugaan yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti dan jawaban tersebut masih diuji secara empiris kebenarannya. Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Variabel PDRB, IPM, jumlah kunjungan wisawatan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal di Provinsi Aceh.

H2 : Variabel jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal di Provinsi Aceh.

C. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan nantinya merupakan data yang berbentuk angka dan akan diuji berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan dan melakukan pengukuran menggunakan metode statistik. Penelitian ini secara empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh seluruh variabel terpilih terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Adapun data sekunder diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Kementerian Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertempat di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebuah objek penelitian, yaitu investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Subjek penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan pada Provinsi Aceh.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat penelitian. Adapun populasi yang diteliti dari PDRB, IPM, jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Aceh pada tiap triwulan dari Tahun 2010 – 2019 dengan jumlah sampel (n) = 40.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memperjelas dalam memahami penggunaan variabel-variabel dalam penelitian untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memberikan batasan antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Sektor Pariwisata Halal (Y) : semua realisasi investasi sektor hotel, restoran dan wisata lainnya yang tercatat pada laporan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPSTP) Aceh pada tahun 2010 – 2019.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (X1) : Variabel ini mempunyai hubungan dan dapat merepresentasikan kualitas manusia di daerah tersebut pada saat itu. Yang mana dapat diasumsikan melalui teori yang telah diuraikan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan semakin meyakinkan investor untuk berinvestasi pada daerah tersebut.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (X2) : Variabel ini mempunyai hubungan yang kuat dengan kondisi perekonomian daerah pada saat itu. Semakin tinggi PDRB nya, maka semakin baik pula kondisi perekonomian di daerah tersebut.
- d. Jumlah Penduduk Miskin (X3) : Variabel ini mempunyai hubungan terhadap kondisi perekonomian di daerah tersebut pada saat itu. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin, tentu mengindikasikan sistematis perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Dan tentu saja hal tersebut akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.
- e. Jumlah Kunjungan Wisatawan (X4) : Variabel ini mempunyai hubungan terhadap *demand-supply* di dalam sektor pariwisata. semakin tinggi jumlah wisatawan yang datang pada daerah tersebut tentu saja akan meningkatkan permintaan di dalamnya. Kemudian implikasi daripada itu adalah konsumen harus meningkatkan penawaran agar keseimbangan sistem pasar tetap terjaga. Termasuk di dalamnya peran investor.

Metode Pengolahan Data

Dikarenakan terdapat tiga variabel yang masih dalam rentang waktu tahunan sedangkan kebutuhan penelitian adalah dalam bentuk triwulan. Maka dari itu, terhadap

variabel IPM, jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk tahunan akan di-interpolasi kan menjadi triwulan. Pada penelitian ini, interpolasi langsung dilakukan menggunakan alat analisis yang terdapat pada IBM SPSS Statistics 24.

Metode Analisis Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu IPM (X1), PDRB (X2), Jumlah penduduk miskin (X3) dan Jumlah kunjungan wisatawan (X4) terhadap variabel terikat yaitu Investasi sektor pariwisata halal (Y).

Fungsi persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Investasi sektor pariwisata halal
- X1 = Indeks Pembangunan Manusia
- X2 = Produk Domestik Regional Bruto
- X3 = Jumlah penduduk miskin
- X4 = Jumlah kunjungan wisatawan
- β_0 = Intersep
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = koefisien regresi
- e = *error term*

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Tabel Kolmogorov-Smirnov (Uji Normalitas)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.30538230
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.473
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,979 yang memenuhi dasar pengambilan keputusan data berdistribusi normal yaitu Sig > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan residual berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual antara variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah

Penduduk Miskin dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap realisasi investasi sektor pariwisata halal berdistribusi dengan normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Tabel Pengujian Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	IPM	.330	3.026
	PDRB	.275	3.634
	Penduduk Miskin	.313	3.193
	Kunjungan Wisatawan	.178	5.617

a. Dependent Variable: Investasi Sektor Pariwisata

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Pengujian multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat VIF dan nilai *tolerance* yang diperoleh. Jika nilai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF pada variabel IPM, PDRB, jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Tabel Glejser(Uji Heterokedastisitas)

Model		Sig.
	(Constant)	.353
	IPM	.419
1	PDRB	.106
	Jumlah Penduduk Miskin	.494
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	.810

a. Dependent Variable: Abs.res

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Pada Uji Glejser yang terlihat pada tabel di atas, terlihat bahwa Nilai signifikansi dari keseluruhan variabel lebih tinggi dari 0,05, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis model dan pengujian hipotesis dari regresi linear berganda pada Investasi Sektor Pariwisata Halal (Y) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri dari IPM, PDRB, jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	13.370	1.844
	IPM	.143	.043
	PDRB	.190	.042
	Penduduk Miskin	.001	.041
	Kunjungan Wisatawan	.401	.094

a. Dependent Variable: Investasi Sektor Pariwisata

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Hasilnya dapat dilihat pada kolom B. Angka tersebut dapat memberikan interpretasi pengaruh tiap variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, apabila variabel IPM mengalami kenaikan 1% sedangkan variabel lainnya konstan, maka investasi meningkat sebanyak 0,143. Begitu pula pada variabel X lainnya.

Pengujian Hipotesis

Uji T (Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji T

Coefficients^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	7.251	.000
	IPM	3.367	.002
	PDRB	4.512	.000
	Penduduk Miskin	.028	.978
	Kunjungan Wisatawan	4.260	.000

a. Dependent Variable: Investasi Sektor Pariwisata

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Untuk ketentuan tabel di atas adalah nilai sig < 0,05 (Derajat Signifikansi) berarti signifikan dan nilai t > t tabel (2.03011) berarti memiliki pengaruh. Merujuk pada ketentuan tersebut, IPM (X1), PDRB (X2) dan jumlah kunjungan wisatawan (X4) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal (Y) sedangkan jumlah penduduk miskin (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal (Y).

Uji F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	10.381	.000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Investasi Sektor Pariwisata

b. Predictors: (Constant), Kunjungan Wisatawan, PDRB, IPM, Penduduk Miskin

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil dari uji statistik F didapatkan nilai statistic f hitung 10.381 dan nilai signifikansi 0,000 dimana hasil ini lebih besar dari F tabel (2.64) pada n sebesar 40 sehingga Ho ditolak yang mana dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap investasi sektor pariwisata halal adalah berpengaruh secara simultan.

Hasil Analisa Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R Square
1	.543

a. Predictors: (Constant), Kunjungan Wisatawan, PDRB, IPM, Penduduk Miskin

b. Dependent Variable: Investasi Pariwisata

Sumber : Data Sekunder Diolah (2020)

Diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.543 atau (54%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap investasi sektor pariwisata halal sebesar 54%. Atau variasi variabel independen yang terdiri dari variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah kunjungan wisatawan mampu menjelaskan sebesar 54% variasi variabel dependen (investasi pariwisata). Sedangkan sisanya sebesar 56% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh IPM Terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal

Pada investasi sektor pariwisata halal, variabel IPM (X1) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.002 pada tabel Coefficients^a dengan nilai (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.002 < 0.05$ atau terdapat pengaruh yang signifikan dan uji t menunjukkan $3.367 > t$ tabel (2.03011). Artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Hasil regresi sebesar 0.0143 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel IPM mengalami kenaikan 1% maka investasi sektor pariwisata (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.143.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meirinaldi (2014) yang mengatakan bahwa semakin tinggi IPM suatu daerah maka semakin tinggi daya saing Sumber Daya Manusia pada daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja ataupun Sumber Daya Manusia yang ada di suatu daerah juga merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi (Venti Eka Satya, 2019).

Di dalam penelitian yang lain juga disebutkan bahwa jika IPM naik, artinya indikator non-ekonomi dalam pembangunan ekonomi meningkat, baik dari segi kesehatan, jenjang pendidikan dan angka harapan hidup. Yang maa hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan semakin berkualitasnya Sumber Daya Manusia yang

berimplikasi pada pembangunan ekonomi yang akan berjalan dan memberikan peluang kepercayaan kepada investor (Muhammad Nizar Dharmawan, 2018).

Pengaruh PDRB Terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal

Pada investasi sektor pariwisata halal, variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.000 pada tabel Coefficients^a dengan nilai (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$ atau terdapat pengaruh yang signifikan dan uji t menunjukkan $4.512 > t$ tabel (2.03011). Artinya Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan secara parsial terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Hasil regresi sebesar 0.0190 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel PDRB mengalami kenaikan 1% maka investasi sektor pariwisata (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.190.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan untuk meneliti keterkaitan PDRB dan Penanaman Modal Dalam Negeri di provinsi Riau (Ronald Iswandi, 2017). Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini ditandai dengan peningkatan PDRB yang semakin tinggi, maka hal tersebut akan memberikan perkembangan yang positif terhadap minat investasi. yang mana di satu sisi pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya beli ataupun konsumsi di masyarakat. Selanjutnya, dengan tingginya daya beli yang terjadi di masyarakat, maka *Return* terhadap modal beserta keuntungan investor akan didapatkan lebih cepat dan lebih banyak.

Di dalam *Harrod-Domar Growth Model*, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi memang perlu mengandalkan investasi dalam mekanisme perekonomiannya. Investasi dibutuhkan untuk menjadi tambahan netto terhadap stok modal (*Capital Stock*), yang mana hal ini merupakan bagian dari mekanisme untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, sedikit banyaknya mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB pada provinsi Aceh tiap tahunnya berdampak baik pada minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata halal di Aceh.

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal

Pada investasi sektor ini, variabel Jumlah Penduduk Miskin (X3) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.978 pada tabel Coefficients^a dengan nilai (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.978 > 0.05$ atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan uji t menunjukkan $0.028 < t$ tabel (2.03011). Artinya Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Hasil regresi sebesar 0.001, yang mana pada saat jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 1%, maka investasi meningkat 0.001.

Tentu saja hasil ini berlawanan dari hipotesis yang peneliti ajukan. Dan juga hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ichwan Nur Roshid, Sudati Nur Sarifah dan Panji Kusuma P (2019) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pada Kota Magelang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi di kota tersebut.

Dengan asumsi kondisi penduduk miskin merupakan representasi dari kondisi perekonomian daerah tersebut, maka hal tersebut dapat sejalan dengan pernyataan alumnus Magister Sains Universitas Indonesia, Liberty Pandiangan (2005) yang menyatakan bahwa memang tidak selamanya kondisi perekonomian yang baik serta merta menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah. Begitu pula penurunan angka kemiskinan tidak serta merta meningkatkan realisasi investasi pada suatu sektor. Karena

bisa saja dampak yang ditimbulkan dari menurunnya angka kemiskinan lebih kepada sektor yang lain.

Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan penurunan angka jumlah masyarakat miskin di Aceh tidak serta merta menaikkan daya beli masyarakat terfokus dalam pasar pariwisata. karena seperti yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pasar pariwisata Aceh memang lebih di dominasi oleh pengunjung dari luar Aceh, hal ini terlihat seperti pada tahun 2018 dari 2,5 juta pengunjung, hampir 2,3 juta orang merupakan pengunjung dari luar Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun jumlah penduduk miskin di Aceh terhitung cukup tinggi di Sumatera, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja investasi sektor pariwisata di Aceh secara signifikan.

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Investasi Sektor Pariwisata Halal

Pada investasi sektor pariwisata halal, bahwa variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan (X4) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.000 pada tabel Coefficients^a dengan nilai (derajat signifikansi) 0.05 artinya $0.000 < 0.05$ atau terdapat pengaruh yang signifikan dan uji t menunjukkan $4.260 > t$ tabel (2.03011). Artinya Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap investasi sektor pariwisata halal di Provinsi Aceh. Adapun nilai regresi nya adalah 0.401, yang memiliki arti jika variabel ini mengalami kenaikan 1%, maka memberikan pengaruh kenaikan kepada investasi sebesar 0.401.

Hal ini sejalan dengan disertasi dari Faurani I Santi Singagerda (2014) yang menyatakan bahwa kunjungan wisatawan, konsumsi wisatawan perkunjungan sangat berdampak terhadap permintaan pariwisata di Indonesia. Yang kemudian ditekankan bahwa total penyediaan barang dan jasa pariwisata, total belanja pemerintah dan total penawaran investasi pariwisata ternyata sangat berdampak terhadap penawaran pariwisata di Indonesia. Hal ini juga semakin menguatkan teori yang disampaikan oleh Gunn (1988) terkait sistem fungsional pariwisata melalui pendekatan *Supply* dan *Demand*.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa *Refocusing* program pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata merupakan langkah yang tepat untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta peluang yang dimiliki Aceh melalui sektor pariwisata halalnya. Sehingga peningkatan jumlah wisatawan yang dialami tiap tahunnya juga membuahkan hasil yang lebih optimal bagi pendapatan daerah di Aceh.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sebagai penutup dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari paparan data, analisa yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk miskin dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal di Aceh pada tahun 2010-2019.
2. Secara parsial, variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal di provinsi Aceh pada tahun 2010-2019 adalah variabel IPM (X1), PDRB (X2) dan jumlah kunjungan wisatawan (X4).

3. Secara parsial juga menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin (X3) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap investasi sektor pariwisata halal di provinsi Aceh pada tahun 2010-2019.

Saran

Dari proses penelitian yang cukup panjang ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang sekiranya membutuhkan atau tertarik dengan penelitian dengan tema yang serupa. Maka, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Aceh diharapkan untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam, kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki Aceh dengan se-kreatif mungkin, sehingga sektor ini dapat menjadi salah satu sektor penyumbang pemasukan ke Aceh dan juga dapat memberikan citra yang baik bagi Aceh kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat di belahan dunia lainnya.
2. Bagi pelaku usaha pariwisata agar terus mengembangkan usaha pariwisatanya dan bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mempermudah investor melakukan penanaman modal pada sektor terkait
3. Bagi para wisatawan agar terus menjaga kelestarian dan kebersihan alam kita bersama serta membantu pemerintah dan pelaku usaha pariwisata melalui promosi dan bantuan-bantuan kreatif lainnya sehingga sektor ini dapat terus berkembang dengan baik.
4. Bagi para akademisi untuk terus berupaya memberikan penjelasan dan edukasi terkait konsep ideal pariwisata halal sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi di kalangan masyarakat Indonesia.
5. Bagi mahasiswa ataupun peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tema ini secara lebih dalam, diharapkan dapat menambah variabel-variabel lainnya sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan terkait pariwisata halal. Dan juga memperluas ruang lingkup penelitian mengingat potensi pariwisata halal bukan hanya berada di Aceh melainkan hampir di seluruh pelosok nusantara.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2019). Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan III dan Januari – September Tahun 2019. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2009). Aceh Dalam Angka 2009.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2014). Provinsi Aceh Dalam Angka 2014.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh September 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). Provinsi Aceh Dalam Angka 2019.
- Boediono. (1998) Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE, Yogyakarta.
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management*, III (7), 277-279.

- Dharmawan, Muhammad Nizar. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Jawa Barat Tahun 2010-2016. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Djakfar, Muhammad. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi. UIN-Maliki Press. Malang.
- Herlambang, Tedy dkk. (2001). Ekonomi Makro. Jakarta: PT. Gramedia
<https://nasional.kontan.co.id/news/tren-investasi-di-indonesia-tengah-meningkat-ini-alasannya> diakses pada 12 Februari 2020
<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F13965/Investasi%20pertumbuhan-BI.htm> diakses pada 22 Juni 2020
- Iswandi, Ronal. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Suku Bunga Kredit Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Riau Tahun 2001-2015. Pekanbaru. JOM Fekon, Vol. 4, No. 1. Hal 634 – 646.
- Kementerian Pariwisata. (2015). Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syari'ah. Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta
- Makhfudz, M. (2016). Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan di Indonesia. Universitas Tama Jagakarsa. ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Hal. 19-35.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat*. Jakarta : Erlangga.
- Marsela, Ni Made Krisna (2014). Pengaruh Tingkat Inflasi, PDRB, Suku Bunga Kredit, Serta Kurs Dollar Terhadap Investasi. Universitas Udayana. Bali. E-Jurnal EP Unud, Vol. 3, No. 3, Hal. 77-87.
- Mastercard-Crescenting. (2018). Global Muslim Travel Index 2018. Singapore.
- Mastercard-Crescenting. (2019). Global Muslim Travel Index 2019. Singapore
- Mastercard-Crescenting in Partnership With Ministry of Tourism Indonesia. (2019). Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019. Singapore
- Meilani, Hilma. (2019). Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya. Jakarta Pusat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI, No.19/I/Puslit/Oktober/2019.
- Meirinaldi. (2014). Komparasi ASEAN : Peran Tingkat Bunga, Realisasi Kredit, IHSG dan IPM Terhadap Investasi. Universitas Borobudur. Jurnal Ekonomi, Vol. 16, No. 2, Hal. 176-203.
- Nurhayati. (2016). Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2014. Universitas Kepulauan Riau. Vol. 5, No. 2.
- Omi, Sarah. (2018). Kebijakan Halal Tourism Sebagai Strategi Peningkatan Foreign Direct Investment Bidang Kepariwisata di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Surabaya.
- Roshid, M. Ichwan Nur, Dkk. (2019). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Kemiskinan Terhadap Investasi di Kota Magelang Tahun 2006-2018. Universitas Tidar. Magelang. Directory Journal of Economic, Vol. 1, No. 3, Hal. 348-359.
- Richardy, Muhammad Adgyl. (2014). Analisis Keseuaian Permintaan (Demand) Wisatawan dan Penawaran (Supply) Obyek Wisata Pantai Walengkabola. Universitas Diponegoro. Jurnal Teknik PWK, Vol. 3, No. 3. Hal 519-531.
- Sadono, Sukirno. (1998). Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi ke-2. Jakarta.
- Sadono, Sukirno. (2008). Makro Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (1981). Ekonomi Pembangunan. Borta Gorat. Medan

- Santi, Faurani. (2014). Faktor-Faktor Penentu Aliran Permintaan dan Penawaran Investasi, Barang dan Jasa Pariwisata Indonesia. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Vol. II, No. 1, Hal. 1-14.
- Satya, Venti Eka. (2019). Upaya Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif. Jakarta Pusat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI, No.06/II/Puslit/Maret/2019.
- Septiandi, Bambang. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Sektor Properti Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 – 2010. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Singagerda, Faurani I santi. (2014). Faktor-Faktor Penentu Aliran Investasi, dan Perdagangan Pariwisata Serta Dampaknya Terhadap Permintaan dan Penawaran Pariwisata Indonesia. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Swanitarini, Astiti. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2011-2014. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 5, No. 5. Hal. 365-372.
- Utomo, Dani Priyo. (2011). Investasi di Sektor Hotel dan Restoran dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Kota Cirebon. Insitutut Pertanian Bogor. Bogor.
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- _____. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.
- _____. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanmaan Modal.
- _____. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.